

IMPLEMENTASI PROGRAM STIMULAN JAMBAN UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN

IMPLEMENTATION OF THE LATRINE STIMULANT PROGRAM TO MAINTAIN CLEANLINESS

Siti Nur Amanah, Lukman Arif*

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penyediaan akses sanitasi yang mencukupi tepatnya jamban merupakan peran penting untuk menciptakan Desa *Open Defecation Free* (ODF) dan merupakan langkah untuk mengatasi Buang Air Besar Sembarangan. Banyaknya masyarakat yang melakukan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di sungai merupakan akibat dari kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang ditemukan banyaknya masyarakat yang melakukan praktik BABS di Kabupaten Tuban khususnya di Desa Tingkis yang menduduki desa paling tinggi tingkat BABS per Agustus 2023. Melalui Program Stimulan Jamban pemerintah Kabupaten Tuban berusaha menekan angka BABS tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui proses implementasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program stimulan jamban di Desa Tingkis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn berdasarkan enam elemen fokus penelitian yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Stimulan Jamban Sehat di Desa Tingkis, Kabupaten Tuban sudah terlaksana dengan baik namun masih perlu adanya perbaikan dalam pemenuhan standar bangunan jamban dan dari segi anggaran.

Kata kunci: Kebijakan publik, buang air besar sembarangan, Program Stimulan Jamban

ABSTRACT

Providing access to adequate sanitation, specifically latrines, is an important role in creating Open Defecation Free (ODF) villages and is a step to overcome open defecation. The number of people who practice open defecation in the river is a result of the habits of people who are less aware of the importance of maintaining a clean and healthy environment. This research was conducted based on the phenomenon that many people practice open defecation in Tuban District, especially in Tingkis Village, which has the highest open defecation rate as of August 2023. Through the Jamban Stimulant Program, the government of Tuban District is trying to reduce the rate of open defecation. This study aims to determine the implementation process as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of the latrine stimulant program in Tingkis Village. To answer the research questions above, the researcher used the Van Meter and Van Horn model policy implementation theory approach based on six elements of research focus, namely standards and objectives, resources, communication between implementers, characteristics of implementing organizations, social, economic and political environmental conditions, and implementer attitudes. Using qualitative research methods with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the Implementation of the Healthy Latrine Stimulant Program in Tingkis Village, Tuban Regency has been carried out well, but there is still a need for improvement in meeting latrine building standards and in terms of budget.

Keywords: Public policy, open defecation, Latrine Stimulant Program

PENDAHULUAN

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah sebuah program nasional dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan akses sanitasi dasar di Indonesia. Selain itu program ini juga erat hubungannya dengan target *Millenium Developent Goals* (MDGs) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdiri dari 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan, 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), 4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dan 5)

Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Terkait dengan pilar 1 STBM, menurut Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan 2022 angka stop buang air besar sembarangan (SBS) atau bisa juga disebut dengan *Open Defecation Free* (ODF) di Indonesia sudah menyentuh angka 5.69% pada 2021. Indonesia diperkirakan akan bebas dari buang air besar sembarangan yaitu pada tahun 2025. Sedangkan akses sanitasi aman di Indonesia baru menyentuh angka 7.25% pada 2021, dimana progress akses sanitasi aman cenderung stagnan pada periode 2017-2021. Capaian indikator persentase desa/ke-lurahan yang telah deklarasi SBS secara nasional

adalah 57,01%, atau lebih rendah dari target nasional 60% di 2022.

Berdasarkan data dari website STBM Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur terdapat 4 Kabupaten yang akses sanitasinya telah mencapai 100% yaitu Kota Blitar, Kab. Blitar, Kota Mojokerto, dan Kab. Gresik. Kemudian 11 kabupaten/kota di Jawa Timur telah dinyatakan ODF seperti Kab. Paciran, Kab. Ngawi, Magetan, Kota Madiun, Kab. Lamongan, Kab. Pamekasan, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Batu, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Trenggalek. Berdasarkan data diatas Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang belum dinyatakan ODF bahkan menurut Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban capaian Desa ODF di Kabupaten Tuban pada tahun 2021 sebesar 28,60 % yang artinya hanya ada 94 Desa ODF dari 328 Desa yang ada di Kabupaten Tuban. Masih rendahnya capaian Desa ODF tersebut menyebabkan Kabupaten Tuban menduduki ranking dua terendah Se-Jawa Timur pada saat itu.

Desa Tingkis merupakan salah satu desa di Kabupaten Tuban dengan tingkat BABS tertinggi di Kabupaten Tuban. Per agustus 2023 dari total keseluruhan KK (Kartu Keluarga) yaitu 950 KK, sejumlah 522 KK yang telah mengakses jamban sehat yang artinya masih terdapat 428 KK masyarakat yang masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan di sungai. Jika dipresentasikan maka hanya 54,95% masyarakat yang telah mengakses jamban sehat. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Desa Tingkis masih cukup tertinggal terhadap akses sanitasi yang layak.

Program Stimulan Jamban Sehat merupakan program pemberian stimulan jamban sampai terealisasi bantuan stimulan yang diberikan ke masyarakat dengan terpasangnya closet, septik tank, dan resapan sehingga bantuan stimulan ini dapat langsung digunakan oleh masyarakat. Pemberian stimulan jamban yang diserahkan ke masyarakat dengan tujuan masyarakat berkomitmen untuk dapat, mengurangi perilaku masyarakat yang masih BAB Sembarangan. Pemberian bantuan stimulan jamban ini diberikan ke masing – masing rumah (Kartu Keluarga) yang belum memiliki jamban. Pelaksanaan program stimulan jamban sehat di Desa Tingkis telah dilakukan setiap tahun dengan anggaran yang telah ditentukan dan melibatkan banyak pihak namun upaya yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang diharapkan karena masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan BABS di sungai meskipun telah memiliki jamban.

Pembuangan tinja manusia yang dilaksanakan secara tidak layak tanpa memenuhi syarat sanitasi dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah dan sumber penyediaan air bersih terlebih Desa

Tingkis merupakan desa aliran air dimana seluruh desa dikelilingi oleh sungai-sungai kecil. Selain itu Desa Tingkis merupakan desa wisata yang berbasis pada air yaitu wahana susur sungai. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi program stimulan jamban sehat di Desa Tingkis, Kabupaten Tuban.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Arti kata kualitatif sendiri yaitu berasal dari kata kualitas, yang sering disebut oleh masyarakat sebagai lawan kata dari kuantitas yang merujuk pada jumlah (angka) atau banyaknya suatu objek tertentu seperti, kuantitas penduduk dan lain sebagainya (Abdussamad, 2021). Dengan menggunakan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang studi penelitian, yaitu Implementasi Program Stimulan Jamban di Desa Tingkis, Tuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan

Standar

Standar dalam suatu kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di implementasikan dengan baik. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka akan terjadi kesalahpahaman sehingga dapat menimbulkan konflik diantara implementator (Putong & Wahyudi, 2022). Pelaksanaan implementasi program stimulan jamban sehat di Desa Tingkis memiliki regulasi/ standar yang mengikat dan telah ditetapkan pemerintah guna mengatur dalam pelaksanaan program stimulant jamban yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Tentang STBM No. 03 Tahun 2014,
- 2) Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2021
- 3) Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2014 dan
- 4) Surat Edaran dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Namun hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa implementasi program stimulant jamban sehat ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan seperti yang tercantum dalam Permenkes STBM No. 03 Tahun 2014 yaitu tercantum bahwa standar dan persyaratan kesehatan bangunan pada jamban meliputi bangunan atas (atap jamban), bangunan tengah (closet) dan bangunan bawah (septic tank). Sedangkan dalam program stimulant jamban ini pemerintah Kabupaten Tuban hanya memberikan bantuan berupa bangunan tengah dan bangunan

bawah tanpa bangunan atas/ rumah jamban (rumah jamban).



Gambar 1. Bantuan Stimulan Jamban

Kemudian hasil penelitian juga ditemukan bahwa pada akhir 2023 Kabupaten Tuban, termasuk juga Desa Tingkis telah mendapatkan predikat ODF atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan. Dikarenakan hal tersebut implementasi program stimulan jamban di Desa Tingkis belum memenuhi standar yang tercantum dalam Permenkes STBM No. 03 Tahun 2014 yaitu indikator sebuah desa dapat dikatakan telah mendapatkan status *Open Defecation Free* (ODF) adalah salah satunya yaitu adanya sanksi yang berlaku, peraturan atau usaha lain dari masyarakat dalam mencegah terjadinya BABS, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tuban belum ada peraturan terkait sanksi yang berlaku kepada masyarakat yang melakukan BABS, begitu juga di Desa Tingkis belum ada peraturan yang mengatur terkait sanksi yang berlaku kepada masyarakat dan hanya berupa teguran saja dimana teguran itu berlanjut dengan tanggapan dari masyarakat yang meminta untuk diberi bantuan stimulant saja jika memang tidak boleh BABS.

Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi program stimulan jamban sehat di Desa Tingkis Kabupaten Tuban telah memiliki standar/regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun, implementasi yang dilakukan masih belum sepenuhnya memenuhi standar/regulasi yang ada.

Tujuan

Setiap kebijakan/program sudah pasti mempunyai sebuah tujuan yang ingin di capai oleh pembuat kebijakan. Meskipun implementasi program stimulan jamban di Desa Tingkis belum sepenuhnya memenuhi standar/regulasi yang ada, namun tujuan dari adanya program ini dapat dirasakan terbukti semenjak adanya program stimulant jamban banyak dari masyarakat tingkis yang telah memiliki jamban dan telah merubah perilakunya yang semula melakukan BABS di sungai sekarang sudah melakukan BAB di jamban/toilet.

Tabel 1. Progres Pembangunan Program Stimulan Jamban di Desa Tingkis

Tahun	Jumlah KK Belum Punya Jamban	Jumlah Bantuan Stimulan Jamban
2021	491	35
2022	456	15
2023	441	10
2024	431	30 (usulan)

Sumber: Desa Tingkis

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan masyarakat yang tidak memiliki jamban setiap tahun yang berawal pada tahun 2021 terdapat 491 masyarakat hingga pada tahun 2023 tersisa 441 dan adanya rencana pembangunan 30 jamban pada tahun 2024 sehingga tersisa 431 masyarakat yang masih belum memiliki jamban. Hasil wawancara dan observasi penulis menunjukkan hasil bahwa mau tidak mau masyarakat harus merubah perilakunya karena telah mendapatkan bantuan jamban dan telah berkomitmen untuk merubah perilakunya. Selain bertujuan untuk mengatasi perilaku BABS tujuan lain dari adanya program stimulan jamban sehat ini yaitu untuk memutus rantai penyakit berbasis lingkungan juga dalam upaya penurunan kasus stunting.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi yang dilakukan di Desa Tingkis Kabupaten Tuban telah memiliki standar dan tujuan yang jelas namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang ada. Meskipun dalam pengimplementasian program stimulant jamban sehat ini belum sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku namun disisi lain program ini telah menimbulkan dampak yang positif seperti meningkatnya jumlah desa ODF setiap tahunnya kemudian pelan-pelan masyarakat sudah mulai merubah perilakunya yang semula melakukan BABS namun sekarang sudah mulai memanfaatkan jamban yang diberikan dengan baik.

Sumber Daya

Sumber Daya Finansial/Anggaran

Menurut Putra (2014) dikutip dalam (Fauziyah & arif 2021) menjelaskan jika sumber daya finansial merupakan hal penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program. Pada implementasi program stimulan jamban sehat di Kabupaten Tuban dana/anggaran yang digunakan dalam memberikan bantuan stimulant jamban berasal dari dana APBN, dana APBD, dana desa, pajak rokok dan dana CSR. Dana CSR diperoleh dari kolaborasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tuban dan pihak swasta seperti Sabgraha dan WC KOEn. Dana CSR di alokasikan untuk masyarakat

yang sudah tidak produktif dan tidak bisa meneruskan untuk membangun rumah jamban. Kemudian untuk dana APBN ini bukan hanya untuk memberikan bantuan stimulant saja tapi juga untuk pemberdayaan masyarakat seperti memberikan sosialisasi, pemucuan, dan kampanye STBM yang biasa disebut dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan anggaran dana yang dikeluarkan pada setiap jamban yaitu sebesar 3 juta rupiah per jamban biaya tersebut meliputi material bangunan, bangunan septic tank, closet dan tukang. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban telah memberikan bantuan stimulan jamban sebanyak 1.184 jamban sehat berikut rinciannya anggaran biaya yang telah dikeluarkan:

Tabel 2. Anggaran Dana Stimulan Jamban di Kabupaten Tuban

Thn	Jumlah Pambangunan Jamban	Satuan Harga	Jumlah Anggaran Dana
2022	511	3.000.000	1.533.000.000
2023	673	3.000.000	2.019.000.000
2024	1000	3.000.000	3.000.000.000
	Jumlah		6.552.000.000

Sumber: Dinas Kesehatan P2KB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Tuban akan melakukan pemberian bantuan stimulan jamban sebanyak 1000 jamban dimana jika jumlah tersebut dikalikan dengan harga satuan per jamban maka dana/anggaran yang dikeluarkan akan lebih besar daripada pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya padahal pada akhir 2023 Kabupaten Tuban telah dinyatakan ODF. Di Desa Tingkis sendiri menganggarkan dana sebesar 30jt pertahun yang artinya setiap tahun ada 10 jamban yang diberikan kepada masyarakat sedangkan jumlah KK yang masih melakukan praktik BABS di Desa Tingkis sebanyak 431 KK.

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa lambannya peningkatan desa ODF pada tahun sebelumnya disebabkan karena sumber daya finansial/anggaran terhadap sanitasi khususnya jamban sehat masih belum menjadi prioritas pembuat kebijakan kemudian anggaran dana yang bertahap dan tingkat babs yang tinggi sehingga melebihi kuota yang telah dianggarkan.

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang berkualitas dan berkuantitas. Kualitas sumberdaya meliputi keahlian, partisipasi, profesionalisme

kerja, serta kemampuan pegawai, kemudian berkuantitas meliputi jumlah sumber daya apakah telah memenuhi semua kebutuhan/target yang dituju. Sumberdaya merupakan hal yang penting pada keberhasilan pelaksanaan, karena dengan adanya sumberdaya yang handal, pelaksanaan program tersebut akan berjalan dengan baik (Asyafin et al., 2021). Jika ditinjau dari sumber daya manusia nya, baik dari Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR,PRKP telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dinas Kesehatan P2KB dalam melaksanakan implementasi kebijakan turut berkolaborasi dengan para sanitarian puskesmas yang ada di setiap daerah kemudian setiap desa juga memiliki kader desa binaan dari sanitarian puskesmas. Pada Desa Tingkis sendiri terdapat 10 -15 kader yang bertugas membantu sanitarian puskesmas dalam hal update data dan pengawasan implementasi stimulan jamban secara langsung.

Dengan begitu dapat dikatakan sumber daya manusia dalam implementasi program stimulant jamban ini sudah tercukupi apalagi terdapat peran masyarakat di dalamnya. Sehingga implemmentasi program pembangunan stimulant jamban dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh (Herawati, 2018) bahwa meskipun mendapat dukungan dari sarana dan prasarana serta sumber dana yang cukup, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, maka kegiatan dalam organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Intinya, sumberdaya manusia akan menentukan berhasil/tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam organisasi.

Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi merupakan perihal penting yang wajib dilakukan dalam melaksanakan implemmentasi suatu kebijakan, komunikasi dalam implemmentasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang sangat penting sesuai dengan yang dijelaskan oleh Agustino (Mulyono, 2023) dikutip dalam (Nurlia & R, 2021) yaitu implementasi kebijakan publik yang efektif akan terlaksana dengan baik, jika para pembuat keputusan mengetahui para pengambil keputusan jika dilakukan dengan berkomunikasi yang baik. "Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Jika ditinjau dari komunikasi antar pelaksana dalam melaksanakan program stimulan jamban Dinas Kesehatan P2KB dan Dinas PUPR,PRKP melakukan komunikasi melalui rapat kerja, whatsapp dan melalui telfon. Rapat kerja yang dilakukan yaitu terkait sharing data masyarakat yang akan dilakukan pemberian

bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian rapat kerja diadakan dengan mengundang camat, kepala puskesmas dan sanitarian se Kabupaten Tuban.

Komunikasi yang dilakukan terintegrasi dengan baik sampai dengan tingkat bawah. Sanitarian puskesmas yang turut serta ikut dalam rapat kerja mensosialisasikan hasil rapat kepada kader pada setiap desa. Sanitarian Desa Tingkis yaitu Mba Erlina rutin melakukan pembinaan kepada kader Desa Tingkis setiap kegiatan posyandu dan pertemuan di puskesmas.



Gambar 2. Sosialisasi Sanitarian Puskesmas kepada kader desa

Alur komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh tiap tiap OPD atau stakeholder yang terlibat sudah dilakukan dengan baik, mulai dari penyampaian ke pada sasaran program (masyarakat) sebelum program berjalan hingga program dijalankan. Komunikasi dan koordinasi dilakukan secara terkoordinir mulai tingkat atas (pemerintah) hingga bawah (sanitarian puskesmas, kader desa).

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dalam (Fauziah & arif 2021) bahwa suatu implementasi kebijakan, untuk dapat membuahkan keberhasilan yang optimal, maka harus diidentifikasi dan di ketahui karakteristik setiap agen pelaksana yang meliputi skruktur birokrasi, norma dan aturan, serta pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah di tentukan karena organisasi perlu adanya peta untuk menggambarkan kegiatan secara umum dan status dari berbagai bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya. Garis-garis dari berbagai bingkai struktur organisasi menunjukkan interaksi dan hubungan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya dalam implementasi program.

Peninjauan karakteristik organisasi pada penelitian ini yaitu terkait wewenang dan pola pengawasan yang dilakukan oleh setiap pelaksana prog-

ram dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan P2KB dan Dinas PUPR, PRKP Kabupaten Tuban. Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban memiliki wewenang dalam memegang data terkait siapa saja atau desa mana saja yang perlu diberikan bantuan jamban diluar dari data DTKS. Kemudian Dinas Kesehatan P2KB juga mempunyai wewenang dalam turut serta memberikan bantuan stimulant jamban kepada masyarakat selain itu, Dinas Kesehatan P2KB dibantu oleh puskesmas juga memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan *promotive* (promosi kesehatan) dan *preventif* (pencegahan penyakit). Intinya yaitu wewenang dari Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Tuban bukan hanya turut serta memberikan bantuan jamban namun juga ke arah perubahan perilaku masyarakat melalui sosialisasi dan promosi kesehatan. Sedangkan wewenang dari Dinas PUPR,PRKP Kabupaten Tuban sendiri yaitu terkait pembangunan fisik jamban saja.

Kemudian terkait pola pengawasan yang dilakukan yaitu dilakukan melalui kader desa. Di Desa Tingkis pengawasan dilakukan oleh kader desa dan perangkat desa. Setiap bantuan stimulant jamban yang berikan akan dipastikan bahwa bantuan jamban tersebut sudah bisa digunakan dan masyarakat telah merubah perilakunya. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda namun setiap pelaksana program telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Proses implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya terkait perilaku/sikap badan administratif yang bertanggungjawab dan muncul ketaatan pada diri kelompok sasaran/ publik, melainkan juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang bersifat negatif maupun positif (Awan Y. Abdoellah, 2019)

Kondisi lingkungan sosial yang ada Desa Tingkis sendiri yaitu merupakan daerah aliran air dimana banyak sekali sungai sungai kecil yang melintas di rumah-rumah warga. Sehingga kondisi ini mendukung masyarakat untuk melakukan Buang Air Besar Sembarangan. Karena kondisi lingkungan seperti ini juga banyak dari masyarakat Desa Tingkis yang memiliki toilet namun, mereka tidak memiliki septic tank yang kemudian menyalurkan tinja mereka ke sungai. Rumah-rumah masyarakat yang saling berdekatan juga terkadang membuat implementator sulit untuk menemukan lahan yang akan dibangun septic tank sehingga septic tank akan di bangunkan secara komunal pada lahan milik desa setempat.

Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Tingkis bukan merupakan faktor utama dalam perilakunya yang masih Buang Air Besar Sembarangan melainkan karena faktor kebiasaan. Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis masyarakat mengaku bahwa kebiasaan ini sudah dilakukan sedari kecil sehingga susah untuk ditinggalkan, namun karena sekarang sudah diberi bantuan stimulan jamban oleh desa maka mau tidak mau masyarakat harus merubah perilakunya.

Selanjutnya terkait kondisi politik, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kondisi politik tidak berpengaruh dalam program stimulan jamban ini. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sehingga masyarakat yang bisa dikatakan mampu pun menunda untuk membangun jamban karena telah terbiasa melakukan BABS di sungai yang menandakan bahwa faktor ekonomi bukan lah faktor utama dalam perilaku masyarakat BABS pada penelitian ini.

Sikap Pelaksana

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu sikap para implementatornya. Jika implementator kebijakan setuju dengan apa yang ada di dalam kebijakan tersebut maka implementator akan melakukannya dengan senang hati, namun jika ada perbedaan pandangan maka proses implementasi akan mendapatkan banyak masalah (Fauziyah & arif 2021).

Sikap pelaksana yang ditunjukkan oleh implementator dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program yang dapat ditunjukkan terkait respon yang diberikan, kemampuan atau kinerja pemangku kepentingan dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program stimulan jamban dan intensitas tanggapan yang diberikan implementator terhadap program stimulan jamban.

Dinas Kesehatan P2KB dan PUPR, PRKP Kabupaten Tuban memberikan respon yang baik akan program ini, mereka menganggap bahwa dengan adanya program ini maka target kinerja mereka pun akan tercapai. Begitupun respon dari masyarakat mereka sangat antusias dan menerima program stimulan jamban ini dengan baik. Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan juga telah berjalan dengan baik dimana di tingkat desa, kader desa dan sanitarian yang akan memberikan laporan dan update data ke dinas terkait.

Intensitas tanggapan yang diberikan oleh implementator dalam hal ini Dinas Kesehatan P2KB dan Dinas PUPR, PRKP juga baik hal ini dibuktikan dengan akan dibangun sebanyak 1000 stimulan jamban kepada masyarakat meskipun Kabupaten Tuban telah mendapatkan predikat ODF.

Sehingga dapat dikatakan bahwa respon dan kemampuan kinerja yang telah dilakukan antar OPD di Kabupaten Tuban dalam melakukan implementasi program stimulan jamban telah dilakukan dengan baik dan mendapat respon dari masyarakat dengan baik begitu intensitas tanggapan yang di berikan oleh implementator.

KESIMPULAN

Secara umum berdasarkan uraian yang telah disampaikan peneliti diatas, berpacu pada ke enam fokus penelitian menurut Van Meter dan Van Horn yaitu meliputi Standar dan Tujuan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Sikap Pelaksana bahwa Implementasi Program Stimulan Jamban Sehat di Desa Tingkis, Kabupaten Tuban sudah terlaksana dengan baik meskipun pemberian stimulan jamban yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan P2KB belum sepenuhnya memenuhi standar yang berlaku namun dengan adanya program stimulan jamban sehat ini angka Buang Air Besar Sembarangan di masyarakat sudah mulai menurun dan mulai merubah perilakunya untuk melakukan BAB di jamban/toilet. Kemudian minimnya anggaran dana yang tersedia sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhan jamban/toilet yang ada di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya (Urahmah et al., 2023) yaitu terkait implementasi gerakan Stop BABS di Kecamatan Banjang (studi kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar, Palanjungan Sari) bahwa dalam pelaksanaan Gerakan Stop BABS terdapat kendala yaitu, masyarakat belum mengerti terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemari air sungai dengan tidak melakukan praktik BABS di sembarang tempat khususnya sungai, kemudian dari segi pembangunan yaitu tidak dibangun dengan menyeluruh dikarenakan anggaran dana yang di berikan secara bertahap, sedangkan jumlah masyarakat yang tidak memiliki jamban/toilet melebihi dari jumlah kuota yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, E. (2019). Pelaksanaan Odf (Open Defecation Free) Di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. *Publiciana*, 24–39. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/195/182>
- Asyafin, M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>

- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2019). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (p. 1).
- Denni Kurniawan, H. K. (2022). *Peraturan Desa Dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Open Defecation Free*. 4(November), 1377–1386.
- Fauziyah wennyta eka dan arif, L. (2021). *Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan*. 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/Jpu.V4i2.18573>
- Fitriah, R., & Dara, A. (n.d.). *Implementasi Program Open Defecation Free melalui Penyediaan Jamban Sehat di Kelurahan Cibabat , Cimahi Utara Implementation of Open Defecation Free Program Through The Provision of Healthy Latrines in Cibabat Village , North Cimahi*. 125–130.
- Hardani, Nur Hikamtul A., Helmina A., Roushandy A. F., Jumari U., Evi F.U., Dhika J. S., Ria R. I., (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Hasanah, U., . W., & Suryono, H. (2022). *Faktor Determinan Kasus Open Defecation Free (Odf) Di Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Tahun 2020*. *Jurnal Hygiene Sanitasi*, 2(1), 5–11. <https://doi.org/10.36568/hisan.v2i1.3>
- Herawati, P. (2018). *Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi Tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kantor Pemerintah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)*. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 958–961. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1279>
- Julianti, L., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Kasanah, S. U. (2018). *Upaya Mewujudkan Desa Open Defecation Free di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar*. 3(1), 354–364.
- Kasmad, R. (2019). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. *Namaha*, September. <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dan-tesis/>
- Kresna. (2019). *Indikator Implementasi Kebijakan Publik*. *Namaha*, September. <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dan-tesis/>
- Laela Octaviana Yusuf, Slamet Muchsin, R. W. S. (2022). *Implementasi Program Jamban Sehat Puskesmas Mojolangu Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Tasikmadu (Studi Kasus di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. *Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi , Universi*. 16(1), 10–15.
- Miles, Matthew. B., Huberman, A. Michael., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third). SAGE Publications.
- Novanto, H. E., & Wibawani, S. (2023). *Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 179–188.
- Nurlia, & R, N. (2021). *Implementasi Pengawasan Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Open Defecation Free (Odf) Di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru*. *Meraja Journal*, 4(2), 121–141. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.171>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). *Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 338. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8158>
- Putranti, D., & Sulistyorini, L. (2013). *Hubungan antara Kepemilikan Jamban dengan Kejadian Diare di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 7(1), 54–63. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-keslingb03cb54364full.pdf>
- Rizky, Rafieqah Nalar and Mahardika, A. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar (Babs) Di Kecamatan Banjarang (Studi Kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar, Palanjudan Sari*. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing Copyright*.
- Urahmah, N., Ulfah, R., & Riyanor. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar (Babs) Di Kecamatan Banjarang (Studi Kasus Desa Kalintamui, Kaludan Besar, Palanjudan Sari*. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289.
- Yeni Fitri Ningsih. (2021). *Analisis Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Di Desa Kedaton Kabupaten Oku Tahun 2021*.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.